

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER- 19 /PJ/2014  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK  
 FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG  
 PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA  
 PETUNJUK PENGISIANNYA

<b>FORMULIR</b>	<b>1770 S</b>	<b>SPT TAHUNAN</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	<b>2 0</b>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE - ...
PERHATIAN • SEBELUM MENGISIBACADAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISIDENGANHURUF CETAK/DIKETIKDENGAN TINTAHITAM • BERITANDA"X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI				
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : <input type="text"/>			
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>			
PEKERJAAN : <input type="text"/>				KLU : <input type="text"/>
NO. TELEPON : <input type="text"/>				NO. FAKS : <input type="text"/>
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT				
NPWP ISTERI / SUAMI : <input type="text"/>				
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.				
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)				
				RUPIAH *)
<b>A. PENGHASILAN NETO</b>	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Diisi akumulasi jumlah penghasilan netto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]</small>			1
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]</small>			2
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]</small>			3
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)			4
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB			5
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)			6
<b>B. PENGHASILAN PAJAK</b>	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/I/ <input type="checkbox"/>			7
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)			8
<b>C. PPh TERUTANG</b>	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) <small>[Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G Lampiran huruf d]</small>			9
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN			10
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)			11
<b>D. KREDIT PAJAK</b>	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]			12
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)			13
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT			13
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25			14a
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)			14b
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)			15	
<b>E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR</b>	16 <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TGL LUNAS			16
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TGL BLN THN 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. <input type="checkbox"/> DIPRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)			
<b>F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA</b>	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR			18
	DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI			
<b>G. LAMPIRAN</b>	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21			d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT
	b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29			e. <input type="checkbox"/>
	c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)			
PERNYATAAN				
Dengan mengadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya mengatakan bahwa yang telah beritahuhan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TGL BLN THN				<b>TANDA TANGAN</b>
NAMA LENGKAP : <input type="text"/>				
N P W P : <input type="text"/>				

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP	:	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>		<b>JBA</b>

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>JBB</b>

**BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
<b>JUMLAH BAGIAN C</b>					<b>JBC</b>	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (2)

**Catatan :**

- \* - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-  dari  halaman Lampiran-I

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

## BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIG		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A			JBA

## BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB		

## BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst				
JUMLAH BAGIAN C				JBC	

## BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				